

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengenalan strategi desentralisasi dan kemerdekaan provinsi merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan dan mendanai kemajuan perbaikan di daerah masing-masing. Sesuai dengan konsekuensi eksplorasi dan penilaian pelaksanaan rencana Pendapatan dan Konsumsi Pemerintah Daerah (APBD), beberapa daerah kaya yang didelegasikan dapat mendanai proyek perbaikan mereka sendiri. Adanya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dipercaya dapat mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi, penguatan dan tugas daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur untuk menetapkan kualitas kemampuan pengelolaan daerah di daerahnya sendiri, dan merupakan contoh pelaksanaan otonomi daerah yang benar-benar bertanggung jawab. Kemandirian daerah tercermin dari pelaksanaan daerah otonom yang mampu mengeksplorasi sumber pendanaan, manajemen dan pembiayaan secara mandiri segala kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai indikasi bahwa daerah mampu atau siap dalam pengelolaan fiskal.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari provinsi yang menerapkan sistem otonomi daerah di Indonesia. Pengenalan strategi desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan dan mendanai kemajuan perbaikan di daerah masing-masing sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan penerapan otonomi di suatu daerah, dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara terbuka dan penuh tanggungjawab. Dalam menjalankan tugas dan kekuasaan pemerintah daerah dalam perwujudan kewenangan fiskal, daerah diharuskan dapat mengidentifikasi apa saja keunggulan dan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah juga diperlukan lebih mampu mengidentifikasi sumber keuangan lainnya guna memenuhi keperluan dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah dan juga Dana Perimbangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu pencapaian yang dihasilkan dari suatu pekerjaan di sektor keuangan suatu daerah terdiri dari pendapatan dan pengeluaran menurut beberapa indikator yang ditetapkan oleh kebijakan dan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam pengelolaan atau pertanggungjawaban pada pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran di beberapa Provinsi di Indonesia salah satunya yaitu pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam 3 tahun terakhir untuk rata-rata Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 5% dan penerimaan Dana Perimbangan dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan dimulai dari Tahun 2015 naik 0,58%, tahun 2016 naik 0,67% dan di tahun 2017 naik 0,69%. Dilihat dari laporan tersebut dan setelah melakukan uji hipotesis dengan memakai suatu analisis yakni

analisis regresi linier berganda, hasil penelitian memperlihatkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan Dana Perimbangan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali kontribusi PAD terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh pada tahun 2012-2016 tidak mencapai setengah dari total pendapatan, yaitu sebesar 42,545% dan untuk rata-rata penerimaan dana perimbangan terhadap jumlah pendapatan selama tahun 2012-2016 hampir mencapai setengah dari jumlah pendapatan, yaitu sebesar 41,557%. Dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain itu di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar penerimaan PAD selama 36 bulan (Januari-Desember 2016 s/d bulan Januari-Desember 2018) nampak bahwa untuk rata-rata penerimaan PAD sebesar Rp.569.560.819.141, sedangkan dari 36 sampel yang diamati bahwa penerimaan PAD yang terendah sebesar Rp.46.2963669.371 dan tertinggi adalah sebesar Rp.1.337.467.328.973, Kemudian untuk penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan bahwa dari 36 sampel yang diamati dana perimbangan dengan nilai mean sebesar Rp.1.020.892.253.659, sedangkan nilai terendah sebesar Rp.108.907.237.600 dan tertinggi sebesar Rp.2.838.373.733.122. Dilihat dari hal tersebut PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap kinerja keuangan kota Makasar. Perbandingan dari ketiga Provinsi

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adapun kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat masih terdapat beberapa kesulitan yang dimana dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat belum mampu mengolah potensi sumber-sumber keuangan daerahnya secara maksimal, sehingga Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang diperoleh masih relatif tinggi dan secara tidak langsung Provinsi Jawa Barat tengah mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah yaitu segala pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber pendapatan asli suatu daerah tersebut, sedangkan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan suatu daerah yang didapat dari pemerintah pusat. Dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 1. 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2017-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pusat dan Pinjaman	
		Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Rp)
2017	18,106,710,727,362	13,981,445,314,589	101,388,591,191
2018	19,701,111,500,405	14,208,941,513,901	68,106,160,010
2019	21,522,255,909,952	14,715,372,046,649	78,256,117,794

Sumber Data: Bapenda Provinsi Jawa Barat (Data diolah peneliti)

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pelaksana daerah otonom memiliki berbagai macam potensi yang dapat digali. Sebagai daerah yang memiliki berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan. Perkembangan yang signifikan tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya dalam tercapainya asas otonom pada suatu daerah. Penerimaan PAD di Provinsi Jawa Barat dalam waktu tiga tahun terhitung dapat dilihat pada data tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 1. 2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat 2017-2019

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah	Pendapatan Asli Daerah
2017	16,483,079,173,742	60,274,561,454	345,121,410,237	1,216,243,581,929	18,106,710,727,362
2018	18,153,723,914,503	52,452,573,702	340,537,989,633	1,220,398,022,477	19,701,111,500,405
2019	19,626,304,134,265	56,239,530,756	386,442,976,038	1,453,269,268,893	21,522,255,909,952

Sumber Data: Bapenda Provinsi Jawa Barat (Data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diuraikan bahwa pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai 2019 berkembang secara signifikan dari setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menghadapi perkembangan pada sektor pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun pada sektor penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil

Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mengalami fluktuasi dalam kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pada sektor Retribusi Daerah mengalami penurunan (tidak mencapai target) pada tahun 2018, disebabkan oleh Koperasi Keluarga Besar Dinas Pendapatan tidak merealisasikan pungutan retribusi dikarenakan tanah tempat berdirinya bangunan koperasi dibangun Masjid Al-Akhyar sehingga untuk sementara pungutan terhadap lahan yang digunakan koperasi dihentikan. Sedangkan untuk Hasil kekayaan yang dipisahkan mengalami penurunan pada tahun 2018, disebabkan oleh PT. Jaswita yang tidak melakukan penyetoran dividen secara penuh (sesuai target yang telah ditetapkan) pada tahun 2018.

Selanjutnya mengenai pendapatan transfer yakni dana perimbangan yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat 2017-2019

Tahun	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2017	13,981,445,314,589	1,851,522,979,677	3,011,001,477,000	9,118,920,857,912
2018	14,208,941,513,901	1,804,540,601,861	3,023,552,986,000	9,379,847,926,040
2019	14,715,372,046,649	1,483,785,231,856	3,212,647,404,000	10,018,939,410,784

Sumber Data: Bapenda Provinsi Jawa Barat (Data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan transfer dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan, akan tetapi pada sektor Dana Bagi Hasil mengalami penurunan, diduga besarnya dana perimbangan yang ditransfer pusat bergantung pada kapasitas dan sumber daya yang masing-masing daerah miliki, dan juga bergantung pada regulasi mengenai besaran transfer daerah produksi. Sektor Dana Bagi Hasil mengalami penurunan dikarenakan ketidaktercapaiannya bagi hasil dari PPh dan juga dampak dari penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang masih sangat rentan terhadap kondisi ekonomi global terutama rendahnya harga migas dunia yang masih belum stabil pada akhir tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dalam penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan transfer pusat relatif tinggi dan cenderung mendekati persentasi penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah. Maka dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di Provinsi Jawa Barat dengan judul: **“Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan diantaranya yaitu:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat secara signifikan dari tahun 2017 sampai 2019, tetapi penerimaan pada sektor penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan

yang dipisahkan mengalami fluktuasi dalam kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Penerimaan Pendapatan transfer dari Dana Perimbangan meningkat secara signifikan dari tahun 2017 sampai 2019, tetapi mengalami penurunan pada sektor penerimaan Dana Bagi Hasil dalam kontribusi penerimaan Dana Perimbangan.
3. Perlu adanya pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan Kinerja Keuangan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Kinerja Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelian ini untuk menganalisa kinerja keuangan daerah dengan melihat bagaimana pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan juga dana perimbangan

dengan sumber-sumber yang ada, diantaranya yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan umum di Provinsi Jawa Barat.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat kinerja keuangan daerah Jawa Barat berdasarkan pendapatan fiskal dan dana perimbangan daerah, serta menganalisis kinerja anggaran pemerintah daerah Jawa Barat berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Kajian ini diarahkan sebagai cara untuk memperluas informasi dan peningkatan pengetahuan yang diidentifikasi dengan bagaimana menaksir dan mengkaji laporan keuangan rencana pendapatan dan belanja daerah, sehingga penulis dapat memahami kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Barat dalam pengelolaan anggaran daerah setiap tahunnya, dan penelitian ini diharapkan dapat mencukupi hasil penelitian empiris. akan dipergunakan sebagai petunjuk dan informasi untuk sumber penelitian.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi peningkatan pajak daerah dan perimbangan dana, serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran bagi peningkatan

kinerja pemerintah daerah, digunakan sebagai masukan dari pemerintah daerah.

c. Bagi Umum

Hasil akhir dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah (khususnya di Provinsi dan masyarakat Jawa Barat) dapat meringankan pemerintah dengan turut serta memberikan nasehat.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik merupakan sekumpulan orang atau organisasi yang menjalani kolaborasi dalam melakukan beberapa pekerjaan pemerintahan untuk menyelesaikan kepentingan negara dengan berhasil dan berdaya guna (Pasolong 2013:8). Adapun administrasi publik tersebut sangat bertumbuh dan berkembang, sehingga administrasi publik meliputi berbagai kegiatan pemerintahan atau negara, salah satunya ialah administrasi keuangan negara.

Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikuasai negara, komoditi berupa uang dan surat berharga yang mempunyai nilai, hak dan kewajiban moneter, semua dana dari pihak ketiga yang diperoleh berdasarkan potensinya atau dijamin oleh pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, yayasan, atau lembaga lainnya (Anggara 2016:11).

Adapun Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merupakan Segala bentuk uang atau barang dagangan yang dapat dijadikan milik pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nasional yang dapat dinilai dengan uang serta pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah diartikan sebagai pelaksanaan seluruh hak dan komitmen daerah dalam kerangka pemerintahan daerah. yang dapat diukur dalam mata uang, termasuk seluruh bentuk aset yang berkaitan dengan hak dan komitmen pemerintah daerah. wilayah. Keuangan Daerah diatur oleh Pemerintah Daerah karena alasan untuk menaikkan produktivitas serta kelayakan penyelenggaraan aset keuangan daerah, meningkatkan bantuan pemerintah daerah dan meningkatkan administrasi kepada masyarakat daerah (Khusaini 2018:2).

Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri atau yang seringkali disebut dengan sistem otonomi daerah pemerintah provinsi/daerah diharapkan memiliki sistem otonomi yang lebih baik atau penting sesuai dengan upaya peningkatan sumber penerimaan daerah atau kinerja keuangan daerah (Rosidin 2010: 85-86).

Pengukuran kinerja pada suatu instansi ialah proses penilaian kemajuan kerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam produksi serta kualitas barang dan jasa, dan hasil dari kegiatan yang dibandingkan dengan maskud yang dibutuhkan dan seberapa efektif langkah-langkah untuk mencapainya. (Mahsun 2016:25).

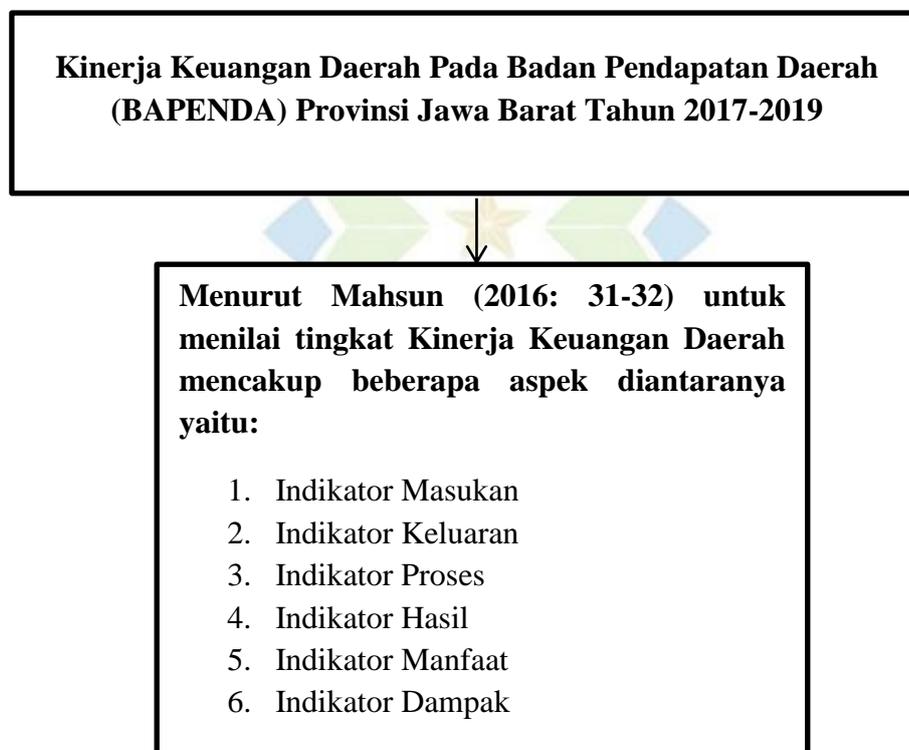
Aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahsun (2016:31-32)

dainatarnya yaitu:

1. Kelompok masukan merupakan seluruh materi yang diperlukan agar penyelenggaraan aktivitas berjalan dengan baik untuk mendapatkan hasil keluaran.
2. Kelompok proses merupakan ukuran pekerjaan dilihat dari seberapa cepat tepat, dan juga tingkat ketepatan dalam pelaksanaannya.

3. Kelompok keluaran merupakan sesuatu yang diperlukan secara langsung dan dapat diraih dari suatu pekerjaan yang bisa dilihat atau tidak.
4. Kelompok hasil merupakan sesuatu yang menunjukkan manfaat keluaran pekerjaan pada jangka menengah yang memiliki akibat langsung.
5. Kelompok manfaat merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan target akhir dari pengimplementasian suatu program.
6. Kelompok dampak merupakan imbas positif atau negatif yang dihasilkan.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat dipaparkan model kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran